



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

STRATEGI **KEBIJAKAN DAN SINERGI
STABILISASI **PASOKAN DAN HARGA PANGAN**
DI PROVINSI **MALUKU UTARA**
(KEDAI PANGANMU)**

Disusun oleh :

Nama : Dheni Tjan, SH, M.Si
NIP : 197507302001121001
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara
Kelas/Kelompok : IV
Nomor Daftar Hadir : 23
Angkatan : III

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Proyek Perubahan dengan judul Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara “KEDAI PANGANMU” dapat diselesaikan. Rancangan Proyek Perubahan ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan proyek perubahan pada tahap Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Rancangan proyek perubahan ini akan memberikan gambaran terkait optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan beberapa strategi pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan tahapan milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Reformer ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Mentor, Coach, Tenaga Pengajar, Penguji, Para Penyelenggara PKN II, tim efektif internal dan eksternal dan seluruh rekan seangkatan PKN II Angkatan III Tahun 2024 yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan berharga dalam penulisan penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan.

Dengan harapan besar, Proyek Perubahan ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara serta Pemangku Kepentingan lainnya. Akhir kata, semoga Proper ini dapat memberikan manfaat dan memberi pencerahan kepada pembaca yang tertarik terhadap isu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Jakarta, 24 April 2024



Dheni Tjan, SH, M.Si / NDH.23
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 197507302001121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
EXECUTIVE SUMMARY.....	vi
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.1. Tujuan Jangka Pendek	15
1.2.2. Tujuan Jangka Menengah	15
1.2.3. Tujuan Jangka Panjang	15
1.3.Manfaat.....	15
1.3.1. Bagi Organisasi/Instansi	15
1.3.2. Bagi Pemerintah Daerah	16
1.3.3. Bagi Masyarakat	16
1.4.Ruang Lingkup.....	16
II. ANALISA MASALAH.....	18
III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	20
3.1.Terobosan Inovatif.....	20
3.2.Pentahapan Rencana Proyek Perubahan.....	20
3.3.Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)	24
3.3.1. Internal	24
3.3.2. Eksternal Pusat.....	24
3.3.3. Eksternal Daerah	24
3.3.4. Susunan Tim	25
3.3.6. Stakeholder	26
3.3.7. Peta Stakeholder	27
3.3.8. Rencana Strategi Marketing.....	30
3.4.Manajemen Resiko.....	32
3.5.Strategi Komunikasi	34
3.5.1. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi dalam Proyek Perubahan.....	34
3.5.2. Mengenal Masyarakat/Khalayak.....	34
3.5.3. Menentukan Tujuan.....	35
3.5.4. Menyusun Pesan	35
IV.RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN Mendukung Proyek PERUBAHAN.....	37
4.1.Manajemen Pemerintahan	37
4.2.Diagnosa Organisasi.....	39
4.3.Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
4.4.Risiko Pengadaan Barang dan Jasa.....	41

V. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	DALAM
ADOPSI PROYEK PERUBAHAN	43
5.1. Kepemimpinan Strategis	43
5.2. Kompetensi dan Pengembangan SDM	44
5.3. Kepemimpinan Digital	45
VI. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI	
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	47
6.1. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	48
6.2.1 Komponen Integritas:	48
6.2.2 Komponen Kerjasama	48
6.2.3 Komponen Mengelola Perubahan:	49
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Tabel Analisis Masalah	18
Gambar II - 2 Analisis SOAR	19
Tabel III-1 Milstone Jangka Pendek	21
Tabel III-2 Milestone Jangka Menengah	23
Tabel III-3 Milestone Jangka Panjang	24
Tabel III-4 Stakeholder Internal.....	26
Tabel III-5 Stakeholder Eksternal.....	26
Tabel III-6 Kelompok Promoters	29
Tabel III-7 Kelompok Latern.....	29
Tabel III-8 Defenders	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Grafik Perkembangan Harga Komoditas yang Mempengaruhi Inflasi di Maluku Utara Tahun 2023	12
Gambar III-2 Analisa Kuadran Stakeholder.....	28

EXECUTIVE SUMMARY

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 46 mengamanatkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang dilaksanakan melalui kebijakan bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Kondisi faktual saat ini seringkali menimbulkan fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas mempengaruhi inflasi pangan. Hal itu karena pemerintah daerah diperhadapkan pada beberapa faktor, antara lain:1) ketersediaan produksi bahan pangan belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah;2) beberapa komoditas pangan masih tergantung pasokan dari luar wilayah;3) akses distribusi pangan membutuhkan sumber daya yang mumpuni; dan 4) sarana dan prasarana distribusi pangan masih minim.

Inflasi Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,38 persen, meningkat menjadi 3,37 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 pada posisi 4,41 persen. Untuk Tahun 2024 periode Januari (y-on-y) inflasi Maluku Utara tergolong tinggi secara nasional, yaitu tercatat sebesar 5,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5,00 persen dengan IHK 107,68, dan terendah di Kota Ternate sebesar 4,19 persen dengan IHK 106,48. Pada bulan Maret 2024 inflasi (y-on-y) Provinsi Maluku Utara sebesar 3,57 persen. Kenaikan inflasi tahunan dan bulanan tersebut juga dipicu kenaikan laju inflasi bahan pangan. Komoditas pangan yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi pada Maret 2024 antara lain : beras, gula pasir, bawang putih, ketimun, ikan malalugis/sorihi, buah naga, ikan cakalang/sisik, dan bawang merah.

Salah satu kunci pengendalian inflasi adalah dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Karena sangat urgen, sehingga saat ini Pemerintah serius melakukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi,hal mana sangat diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pangan melakukan terobosan baru terkait optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yakni akan penyediaan regulasi di daerah berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah, penyediaan Sistem Informasi Terpadu, Penyediaan Kedai PanganMu (Toko Pangan), Fasilitasi Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) Partisipatif, dan optimalisasi sinergi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Instansi terkait serta pelaku usaha pangan. Untuk itu ide gagasan perubahan yang diusulkan disini terkait dengan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara disingkat "KEDAI PANGANMU".

Kata Kunci :
Kebijakan, Sinergi, Optimalisasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

KEDAI PANGANMU adalah akronim kata dari Strategi **Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** di Provinsi **Maluku Utara** yang merupakan ide gagasan dari reformer Dheni Tjan, SH, M.Si/NDH.23. KEDAI berarti menunjukkan sebuah bangunan tempat berjualan/ tempat yang didalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.

PANGAN adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan dan bahan lainnya. Dengan demikian KEDAI PANGANMU dapat diartikan; bangunan tempat berjualan barang/bahan pangan di Maluku Utara.

Pengertian Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Makna inilah yang umumnya dikenal zaman sekarang sebagai arti strategi. Strategi juga berarti pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Kebijakan menurut Carl Friedrich, adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pengertian lain dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan juga diartikan mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan.

Sedangkan Sinergi dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pengertian lain dari Sinergi adalah ineraksi dua bagian yang bekerja sama, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari komponen aslinya.

KEDAI PANGANMU adalah merupakan terobosan perlu adanya kebijakan berupa regulasi di daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah), adanya sistem informasi terpadu, dan optimalisasi kerjasama antara pemerintah/ pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan, pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan, optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Partisipatif, Pelaksanaan Pemantauan Stok dan Harga Pangan, dan Penyediaan Kedai Pangan yang berfungsi juga sebagai wadah Distribusi Pangan, dan penyedia komoditi pangan untuk Gerakan Pangan Murah.

Dengan adanya KEDAI PANGANMU, diharapkan optimal pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan melindungi pendapatan dan daya beli serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Urgensi di Tingkat Nasional

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan di tingkat Produsen dan konsumen. Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Pokok dilakukan melalui penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah, penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah, pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan, pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah, dan pengaturan ekspor pangan dan impor pangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi produsen (Petani/Peternak/Kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas pangan pokok), serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan. Pada Pasal 46 mengamanatkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang dilaksanakan melalui kebijakan bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Kondisi faktual saat ini seringkali menimbulkan fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi pangan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : 1) ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah ; 2) beberapa komoditas pangan pokok masih tergantung pasokan dari luar wilayah; 3) Akses distribusi pangan membutuhkan sumber daya yang mumpuni ; dan 4) Prasarana dan sarana distribusi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kekhawatiran yang semakin besar mengenai dampak ketidakstabilan pasokan dan harga pangan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketidakpastian harga bahan pangan pokok dapat menyebabkan inkonsistensi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat dan menimbulkan inflasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan khususnya

bagi negara-negara berkembang, dimana sebagian besar penduduknya masih menderita kekurangan gizi, dan kerawanan pangan.

Salah satu kunci pengendalian inflasi adalah dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi di seluruh wilayah khususnya dalam menjaga stabilitas pangan dimana sangat diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI dalam rapat terbatas dengan Pejabat Kepala Daerah seluruh Indonesia tanggal 30 Oktober 2023 meminta agar seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah bersinergi untuk menekan harga di pasar. Arahan Menteri Dalam Negeri pada kegiatan gerakan pangan murah serentak tanggal 16 Oktober 2023, bahwa kepala daerah untuk memanfaatkan dana biaya tidak terduga (BTT), insentif fiskal dan bantuan sosial secara optimal dengan pedampingan dari Kejaksaan dan POLRI serta bantuan TNI untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan apabila dibutuhkan.

Kondisi inflasi nasional juga fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 inflasi nasional sebesar 1,68 persen, pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 1,87 persen, pada tahun 2022 naik cukup tinggi menjadi sebesar 5,51 persen, pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 2,61 persen. Untuk bulan Maret 2024 inflasi nasional (y-on-y) sebesar 3,05 persen.

Pengendalian inflasi sangat urgen sehingga setiap tahun dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang dipimpin Presiden secara langsung. Kementerian Dalam Negeri juga setiap minggu pada hari Senin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Terkait dengan pengendalian inflasi daerah, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, tertanggal 19 Agustus 2022. Kemudian Kementerian Keuangan juga menaruh perhatian penuh kepada pengendalian Inflasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk tiga tahun tersebut, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0% dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif

fiskal kepada daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi, Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023, tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Akhir-akhir ini Inflasi/keniakan harga Jenis Pangan Beras signifikan tinggi dan terus dilakukan upaya pengendalian dan penguatan daya beli masyarakat melalui bantuan pangan beras yang penugasannya dari Badan Pangan Nasional kepada Bulog sejak tahun 2023 dan lanjut tahun 2024 yang direncanakan sampai bulan Juni. Untuk pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya jenis pangan beras, jagung dan kedelai, Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

Pembangunan Pangan termasuk salah satu bagian dari isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 dengan tema “Indonesia Emas 2045”. Dalam RPJPN 2025-2045 terdapat 5 Sasaran Utama, yaitu 1) Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju, 2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang, 3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat, 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, 5) Intensitas Emisi GRK Menurun menuju NetZero Emission. Juga terdapat 8 Agenda pembangunan dan yang relevan dengan pembangunan pangan dan lebih khusus lagi terkait upaya optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah pada Agenda 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi, yaitu Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan Iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, dan Agenda 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, yaitu Meningkatkan produktivitas melalui Iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan. Kemudian dari 17 Arah

Pembangunan, relevan dengan Misi 2 Transformasi Ekonomi (point 4. Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi, point 6. Transformasi Digital); Misi 3 Transformasi Tata Kelola (regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif); dan juga relevan dengan Misi 5 Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)

Upaya optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selain selaras dengan RPJPN 2025-2045, juga selaras dengan Konsep Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama konsep terkait Pembangunan Transformasi Ekonomi, yang *highlight* intervensinya antara lain; Peningkatan karakteristik rantai pasok antar pusat pertumbuhan, penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi, penguatan regulasi dan kelembagaan logistik nasional, integrasi dan digitalisasi logistik, pengembangan fasilitas logistik, penguatan pelaku logistik, peningkatan Sumber Daya Manusia Logistik, peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antar daerah dan dengan global.

Untuk pembangunan transformasi tata kelola, pada *highlight* intervensi antara lain dikonsepsikan ; transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN. Salah satu Isu Strategis dalam RPJMN Teknokratik adalah Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, yang salah satu isu-nya adalah tentang Pangan, yaitu ; Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan, peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi, rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan, tingginya fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah, rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan. Adapun Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, khusus untuk Indikator Pembangunan Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. I.1 Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
a. Ketahanan Energi – Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)	6,95
b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi (%)	10,21 (BPS. 2022)	8,46

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Highlight intervensi Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energy, air dan pangan (FEW Nwxus);
2. Menjamin ketahanan energy nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan dan tingkat penerimaan energy;
3. Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, Pangan Lokal, Pangan Akuatik (Blue Food) dan Pangan Perkotaan);
4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, hewani, buah, sayur, serta biofortifikasi dan fortifikasi pangan;
5. Penguatan tata kelola pangan (Pengelolaan susut dan sisa pangan, serta pengembangan satu data pangan).

1.1.2 Urgensi di Tingkat Daerah

Optimalisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan selaras juga dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah, yaitu RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, Rancangan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2025-2045 yang saat ini menunggu pengesahan dengan Peraturan Daerah, dan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029.

Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Wilayah Timur Indonesia dengan jumlah kecamatan sebanyak 118 dan jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk berdasarkan data BPS (Maluku Utara Dalam Angka 2024), pada tahun 2021 sebanyak 1.299.630 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 1.318.470 jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 1.337.150 jiwa. Kebutuhan akan pangan pokok berupa beras sebanyak 474.000 Ton, termasuk kedalam kategori daerah konsumen dimana sebahagian besar kebutuhan pangan pokok masih bergantung dari daerah lain/produsen yakni Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Situasi kemiskinan Maluku Utara berkontribusi 0,30% terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 6,46% di tahun 2023 naik dari tahun 2022 sebesar 6,23%. Karena itu, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan tetap harus menjadi agenda Pembangunan mendasar yang perlu dilanjutkan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara beberapa tahun terakhir dikategorikan sebagai pertumbuhan relatif tertinggi. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yaitu 5,39%. Laju Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pertumbuhan 16,79 persen pada tahun 2021 dan 22,94 persen tahun 2022, kemudian 20,49 persen pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas 2 sektor utama, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan sejak tahun 2021 seiring dengan beroperasinya smelter pengolahan bijih nikel di beberapa daerah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 77,27% serta sektor ekonomi yang lain pun seluruhnya tumbuh positif.

Sebagai provinsi kepulauan, produksi pangan dalam wilayah Maluku Utara belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Tahun 2023 diperkirakan luas panen padi sebesar 7.684 hektar dengan produksi padi sekitar 28.169 ton gabah kering giling (GKG) mengalami peningkatan sebanyak 1.268 hektare atau 19,76 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 6.416 hektar. jika dikonversikan menjadi beras maka diperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk Maluku Utara diperkirakan mencapai 15.764 ton (tahun 2023) mengalami peningkatan sebanyak 2.061 ton atau 15,04 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2022 yang sebesar 13.703 ton (KSA, BPS 2022) sedangkan kebutuhan beras Masyarakat Maluku Utara sebesar 107.248 ton (Prognosa Pangan Maluku Utara, Dinas Pangan 2022), dimana Maluku Utara masih kekurangan beras sebesar 91.484 ton yang dipasok dari luar wilayah Maluku Utara. Hal ini menyebabkan wilayah Maluku utara rentan terhadap kerawanan pangan.

Di skala nasional, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Indonesia 2023 menjelaskan bahwa sebanyak 6 kabupaten (60%) di Maluku Utara masuk dalam prioritas rentan, yaitu Kepulauan Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Pulau Morotai. Penyebab utama kerentanan pangan di wilayah Maluku Utara adalah ketersediaan pangan produksi dalam negeri lebih rendah daripada tingkat konsumsi normatif karbohidrat (300gr per kapita/hari).

Untuk kondisi stunting di Provinsi Maluku Utara, upaya penurunannya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/4890/SJ Tentang Percepatan Penurunan Stunting Daerah, diketahui ada 5 kabupaten/kota di Maluku Utara yang secara perlahan telah berhasil menurunkan angka Stunting, yakni Kota Ternate, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara.

WHO, 2020 mengklasifikasikan *stunting* menjadi 4 kategori yaitu Kategori Rendah (<20%), Kategori Sedang (20-29%), Tinggi (30-39%) dan Sangat Tinggi (>40%). Berdasarkan data Kemenkes tahun 2022, Prevalensi Angka Stunting Maluku Utara di berada pada 26,1 persen, artinya masih diatas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen, saat ini angka kelahiran Maluku Utara berada pada posisi 32 dengan total angka kelahiran 2,47 persen, dan untuk tingkat kelahiran remaja sebanyak 42,40 persen. Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 255 kasus, ini memposisikan Maluku Utara berada pada urutan 27.

Upaya untuk mencapai target Prevalensi Stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen menuntut kerja keras semua pihak untuk melakukan aksi nyata melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dimana Remaja menjadi kunci utama, sebagai penentu Bonus Demografi di masa mendatang, jika remaja hebat seperti Generasi Berencana (Genre) maka itu akan mampu berdaya saing dalam menghadapi generasi emas di tahun 2045”.

Melalui upaya optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, diharapkan memberikan penguatan daya beli masyarakat, dan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau sehingga pemenuhan pangan dan gizi dapat terpenuhi sesuai harapan, yang pada gilirannya dapat memberi andil pada upaya penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara. Berikut dapat dilihat tabel prevalensi stunting di Maluku Utara.

Tabel I-2 Perbandingan Persentase Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota, 2022

No	Kabupaten/Kota	Pervalensi Stunting 2022
1	Halmahera Barat	23,90
2	Halmahera Selatan	31,40
3	Halmahera Tengah	32,20
4	Halmahera Timur	32,30
5	Halmahera Utara	24,90
6	Kepulauan Sula	28,50
7	Pulau Morotai	31,20
8	Pulau Taliabu	23,70
9	Kota Ternate	17,70
10	Kota Tidore Kepulauan	19,10
Maluku Utara		26,10
Indonesia		21,60

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, 2022

Pada Tabel diatas terlihat bahwa Provinsi Maluku Utara masih berada pada kategori Sedang namun angka persentase *stunting* masih lebih tinggi dibandingkan angka Nasional. Sedangkan kabupaten yang berada pada kategori yang tinggi adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Pulau Morotai.

Kemudian terkait Inflasi di Provinsi Maluku Utara juga cenderung fluktuatif, bahkan pada bulan tertentu berada pada posisi tertinggi di atas rata-rata nasional. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah Maluku Utara membuat harga pangan cenderung lebih tinggi terutama karena ongkos distribusi yang besar dari daerah asal. Pasokan pangan Maluku Utara sebagian besar dipasok dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Surabaya.

Sampai dengan Tahun 2023, Kota Ternate adalah salah satu kota yang menjadi barometer inflasi di Maluku Utara selain Kota Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Sepanjang tahun 2021 Kota Ternate mengalami Inflasi 2,38 persen, meningkat menjadi 3,37 persen pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 4,41 persen. Kenaikan inflasi tahunan tersebut juga dipicu kenaikan laju inflasi bahan pangan.

Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan sepanjang tahun 2022, Maluku Utara mengalami inflasi sebanyak delapan kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2022 sebesar 1,82. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar 1,11 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Juli 2022 dipicu kenaikan harga tarif angkutan udara, bawang merah, beberapa jenis

ikan segar, cabai rawit, dan cabai merah. Inflasi tertinggi kedua yaitu pada Bulan Desember dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, bawang merah, beras, dan rokok kretek filter.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Untuk Tahun 2024 periode Januari inflasi Maluku Utara tergolong tinggi secara nasional, yaitu pada Januari 2024 (y-on-y) tercatat sebesar 5,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5,00 persen dengan IHK 107,68 dan terendah di Kota Ternate sebesar 4,19 persen dengan IHK 106,48.

Pad bulan Maret 2024 inflasi (y-on-y) Provinsi Maluku Utara sebesar 3,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,75, Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 3,70 persen dengan IHK sebesar 106,81, dan terendah terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 106,46.

Perkembangan harga berbagai komoditas secara umum di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya kenaikan harga pada Maret 2024. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate, pada Maret 2024, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, antara lain: beras, bahan bakar rumah tangga, kue kering berminyak, angkutan udara, sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir bawang putih, ketimun ikan malalugis/sorihi, angkutan laut emas perhiasan, buah naga, sabun mandi, ikan cakalang/sisik, kue, basah, bawang merah, air kemasan, dan nasi dengan lauk.

Perkembangan harga pangan tersebut juga dipengaruhi kondisi iklim dan cuaca di Maluku Utara. Data proyeksi iklim menunjukkan jumlah hari kering di wilayah Maluku Utara diproyeksikan semakin meningkat khususnya di wilayah Sanana dan Taliabu sedangkan jumlah hujan ekstrem diproyeksikan meningkat di wilayah Halmahera Tengah, Timur dan Selatan. Kondisi iklim ini dapat mempengaruhi proses distribusi barang baik antar wilayah dalam provinsi maupun pasokan distribusi dari luar provinsi. Tinggi gelombang diprediksi akan mengalami peningkatan seiring puncak musim hujan di awal tahun 2024. Tinggi gelombang > 2 meter diprediksi akan sering muncul di bulan Januari – Februari 2024. Wilayah yang memiliki potensi peningkatan tinggi gelombang > 2 meter adalah wilayah perairan Utara Morotai, ternate-Bitung, dan Laut Halmahera.

Tabel I.3 Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Maret 2024 di Kabupaten/Kota Barometer Inflasi Provinsi Maluku Utara (2022-100)

Kabupaten/Kota	Maret 2024		
	IHK	Inflasi (y-on-y) %	Inflasi (m-to-m) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab.Halmahera Tengah	106,46	2,97	-0,62
Kota Ternate	106,81	3,70	0,72
Prov.Maluku Utara	106,75	3,57	0,48

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Pada Tabel berikut dibawah ini ditampilkan data bahan pangan pokok yang menjadi pengamatan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara selama periode bulan Januari s.d Desember 2023



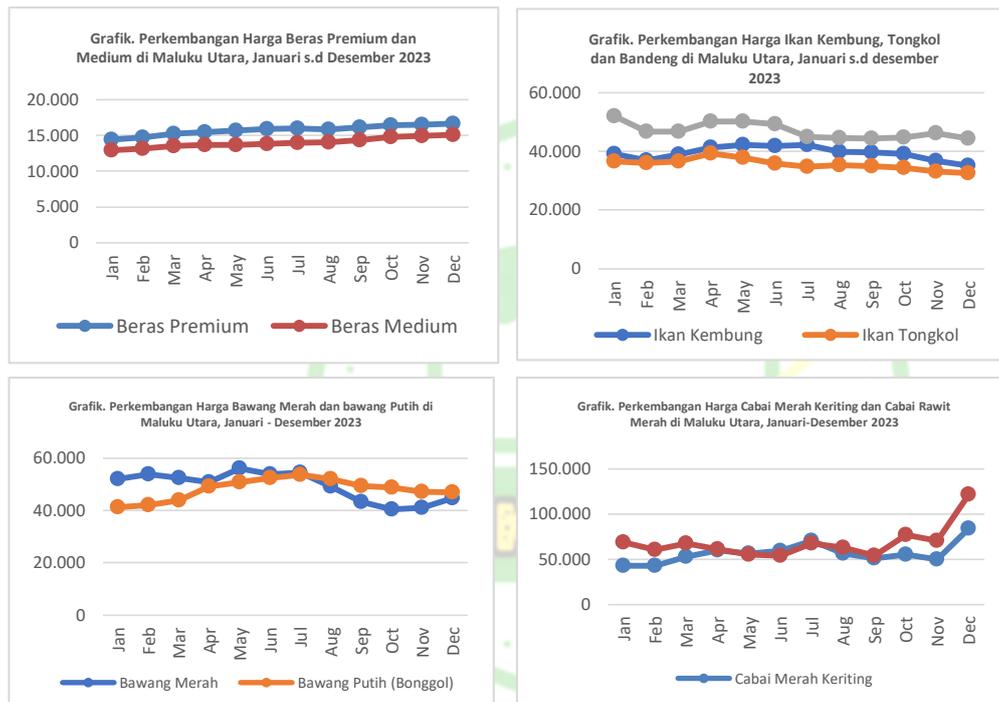
Tabel I-4. Harga Rata-rata Bulanan Pangan di Provinsi Maluku Utara 2023 (dalam rupiah)

Komoditas	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Beras Premium	14,391	14,674	15,226	15,485	15,680	15,858	15,938	15,853	16,091	16,435	16,460	16,657
Beras Medium	12,959	13,172	13,489	13,648	13,697	13,843	13,989	14,028	14,321	14,745	14,929	15,041
Kedelai Biji Kering	15,276	15,864	16,008	16,130	15,484	15,099	14,962	14,904	14,940	14,953	14,851	14,933
Bawang Merah	52,080	53,804	52,483	50,884	56,095	53,799	54,430	49,164	43,382	40,501	41,144	44,698
Bawang Putih (Bonggol)	41,326	41,979	43,935	49,147	50,876	52,335	53,683	52,113	49,353	48,715	47,058	46,919
Cabai Merah Keriting	43,010	42,555	52,679	59,802	56,072	59,413	70,537	56,414	51,132	55,380	49,603	84,050
Cabai Rawit Merah	68,939	60,531	67,414	60,960	55,004	54,039	67,533	62,705	53,907	77,061	70,405	121,548
Daging Sapi Murni	130,132	130,071	129,702	131,094	130,820	131,949	131,355	130,091	129,808	129,774	130,564	130,335
Daging Ayam Ras	46,034	46,029	46,316	45,290	45,318	44,988	46,589	47,856	48,014	47,722	46,400	46,434
Telur Ayam Ras	34,802	32,528	32,311	34,309	34,149	34,580	34,571	34,442	34,471	33,833	33,042	33,158
Gula Konsumsi	15,580	15,616	15,716	15,762	15,704	15,778	15,848	15,970	16,188	16,935	17,511	18,096
Minyak Goreng kemasan sederhana	22,186	21,627	21,555	22,278	22,772	22,111	22,264	22,178	21,896	21,786	21,449	21,444
Tepung Terigu (curah)	12,760	12,661	12,746	12,744	12,696	12,772	12,607	12,628	12,762	12,729	12,691	12,714
Minyak goreng curah	18,905	18,647	19,508	21,173	21,784	20,438	21,106	20,289	19,835	20,140	20,713	20,855
Jagung Tk Peternak	6,898	7,295	7,290	7,729	7,766	7,844	7,936	8,328	8,976	9,105	8,851	8,800
Ikan Kembung	39,082	36,969	38,988	41,423	42,172	41,870	42,258	39,876	39,661	39,257	36,850	35,227
Ikan Tongkol	36,537	36,063	36,712	39,395	37,846	35,968	34,757	35,300	35,046	34,466	33,114	32,604
Ikan Bandeng	52,097	46,744	46,792	50,196	50,341	49,267	45,051	44,574	44,457	44,789	46,250	44,405

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara 2023

Selanjutnya dapat dilihat grafik perkembangan harga beberapa komoditi yang menjadi pemicu terjadinya inflasi pada tahun 2023 di Kota Ternate. Komoditi tersedut antara lain : 1) Beras, 2) Ikan, 3) Bawang Merah dan 4) Cabe.

Gambar I-1 Grafik Perkembangan Harga Komoditas yang Mempengaruhi Inflasi di Maluku Utara Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Jenis pangan pokok tertentu yang menjadi fokus perhatian pada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah Jenis Pangan pokok yang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, tentang Badan Pangan Nasional, serta yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.

Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dan/atau pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara, sejauh ini telah dilaksanakan baik provinsi maupun kabupaten/kota, namun dapat dikatakan belum optimal secara komprehensif sehingga perlu dioptimalkan dan butuh terobosan dan inovasi baru.

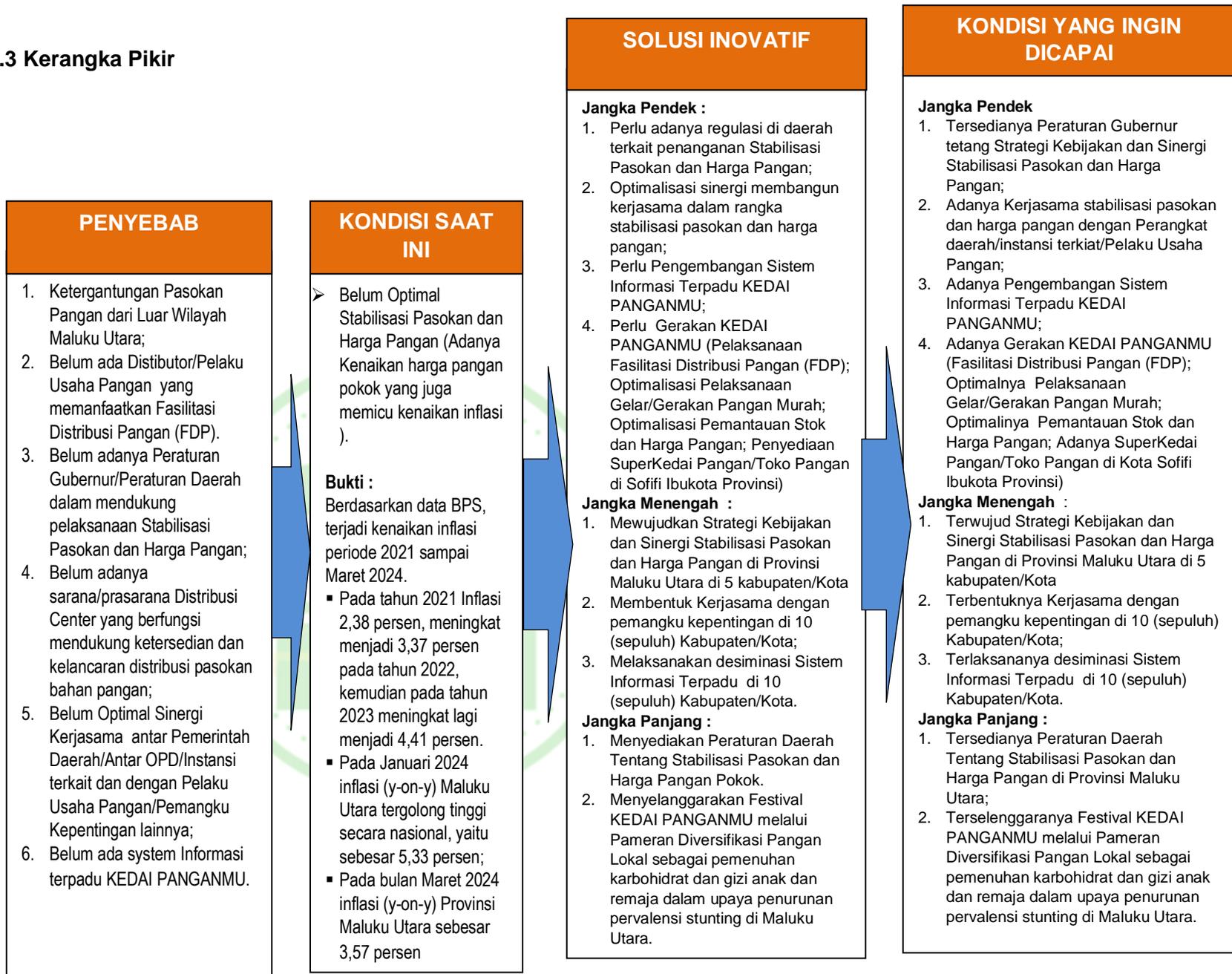
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap tahun melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, termasuk mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kemendagri setiap minggu pada hari senin.

Pengawasan/Pemantuan Stok dan Harga Pangan juga dilakukan Dinas Pangan tetapi belum intensif dan belum bersinergi secara optimal. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) juga masih terbatas kerjasama antara Dinas Pangan dengan Bulog yang juga belum optimal, demikian juga Fasilitasi Distribusi Pangan (subsidi transportasi/biaya angkutan) yang sangat penting untuk menekan harga pangan di tingkat distributor dan konsumen juga belum dimanfaatkan oleh Distributor/Palaku Usaha karena salah satu faktornya belum ada perjanjian kerjasama fasilitasi distribusi pangan. Selain itu, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan masih minim dukungan sarana-prasarana, dan sinergitas yang belum optimal, juga belum didukung kebijakan-regulasi ditingkat daerah berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah.

Dengan mencermati kondisi tersebut di atas, terutama kondisi inflasi di tingkat daerah, maka ide gagasan perubahan dan terobosan inovasi yang diusulkan adalah terkait dengan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara “KEDAI PANGANMU”.

Terobosan tersebut sejalan dengan arahan Presiden, dan juga selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Jaga sesuai dengan Tema Nasional (LAN RI) yaitu “Penguatan Peran Kepemimpinan Nasional Dalam Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2029”, dan sejalan juga dengan Tema PKN Tk.II Angkatan III Kemendagri, yaitu “Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mendukung Transformasi Indonesia Menuju Indonesai Emas. Juga dalam rangka mewujudkan Sub Tema “Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan”. Bahkan lebih khusus lagi memiliki kaitan dengan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak, yakni “Percepatan Prioritas Presiden : Penguatan Tata Kelola Birokrasi Merespon dan Mengawal Hal-Hal Merndesak sesuai Arahan Presiden Untuk Mitigasi Risiko yang Berdampak Serius pada Masyarakat”, seperti Inflasi dan/atau ketidak stabilan Pasokan dan Harga Pangan.

1.1.3 Kerangka Pikir



1.2. Proyek Perubahan

Tujuan dari Rancangan Proyek Perubahan Kinerja Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara adalah untuk melakukan langkah nyata dalam upaya penanganan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tujuan tersebut sebagai berikut :

1.2.1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Terwujudnya Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara di (Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah);
- b. Tersedianya Pertauran Gubernur Tentang Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Provinsi Maluku Utara (KEDAI PANGANMU), Adanya Perjanjian Kerjasama, Adanya Sistem Digital, dan Adanya SuperKedai Pangan Center di Sofifi.

1.2.2. Tujuan Jangka Menengah

- a. Terwujudnya Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara di 5 kabupaten/Kota
- b. Terbentuknya Kerjasama dengan pemangku kepentingan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota;
- c. Terlaksana desiminasi Sistem Informasi Terpadu di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota;

1.2.3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Terselenggaranya Festival KEDAI PANGANMU melalui Pameran Diversifikasi Pangan Lokal sebagai pemenuhan karbohidrat dan gizi anak dan remaja dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara.

1.3. Manfaat

1.3.1. Bagi Organisasi/Instansi

- a. Meningkatnya kinerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dalam upaya penanganan stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- b. Terjalannya Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/OPD/Instansi Terkait dengan Pelaku Usaha/Pemangku Kepentingan;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu KEDAI PANGANMU;
- d. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) Partisipatif, dan Pemantauan Stok dan Harga Pangan secara terpadu;
- e. Tersedianya SuperKedai Pangan Center di Sofifi Ibukota Provinsi Maluku Utara.

1.3.2. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Kemudahan TPID dalam mengambil langkah aktif dalam upaya penanganan inflasi harga pangan;
- b. Terjalannya sinergitas, koordinasi dan komunikasi intensif dalam upaya pengendalian pasokan dan harga pangan;
- c. Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah.

1.3.3. Bagi Masyarakat

- a. Peningkatan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat
- b. Terciptanya Kondisi iklim perdagangan yang kondusif, serta pasokan dan Harga Pangan yang stabil.

1.4. Ruang Lingkup

Sehubungan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan maka proyek perubahan ini akan dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Kerja Internal dan Eksternal;
- b. Dukungan Stakeholder Eksternal;
- c. FGD dan Diseminasi;
- d. Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu KEDAI PANGANMU;
- f. Gerakan KEDAI PANGANMU (Pemantauan Stok dan Harga Pangan, Gelar/Gerakan Pangan Murah Partisipatif, Peluncuran Fasilitas Distribusi Pangan/FDP, Peresmian SuperKedai Pangan);
- g. Launching KEDAI PANGANMU;
- h. Evaluasi dan Pelaporan

1.5. Output dan Outcome

1.5.1 Output

Hasil atau Output yang diharapkan dari Pelaksanaan Proyek Perubahan ini adalah :

1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2. Tersedianya Sistem Informasi Terpadu KEDAI PANGANMU;
3. Adanya Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan;
4. Terbentuknya SuperKedai Pangan di Sofifi Ibukota Provinsi Maluku Utara.

1.5.2 Outcome

Manfaat atau Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini adalah :

1. Peningkatan daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen;
2. Tersedianya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diakses/terjangkau, sehingga dapat juga mencegah stunting;
3. Adanya peningkatan kinerja pengendalian inflasi di daerah.

II. ANALISA MASALAH

Dalam menentukan penyelesaian masalah, perlu dilakukan identifikasi permasalahan atau isu aktual mendasar yang ada pada unit organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang tertuang pada Renstra 2020 s.d 2024. Selanjutnya hasil identifikasi permasalahan/isu tersebut diukur berdasarkan nilai pembobotan menggunakan skala likert - **Metode Urgency, Seriousness and Growth (USG)** untuk mencari skala prioritas, selanjutnya dapat dilihat pada table II-1 dibawah ini :

Tabel II-1 Tabel Analisis Masalah

No	Masalah/Isu	Kriteria			Jumlah	Ranking
		U	S	G		
1	Belum Optimal Diversifikasi Pangan Lokal Sebagai Bahan Pangan Alternatif	3	4	3	10	3
2.	Belum Maksimal Penanganan Kerawanan Pangan	4	4	3	11	2
3.	Belum Optimal Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	4	4	13	1
4.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	3	3	2	8	5
U	Urgen	ANGKA 5		Menyatakan sangat kuat/ besar/tinggi		
S	Serious	ANGKA 4		Menyatakan kuat/besar /tinggi		
G	Growth	ANGKA 3		Menyatakan cukup kuat /besar/tinggi		
		ANGKA 2		Menyatakan kurang kuat /besar/tinggi		
		ANGKA 1		Menyatakan sangat kurang kuat/besar/tinggi		

Berdasarkan hasil **Analisa USG (Urgency, Seriousness, Growth)** terhadap permasalahan/isu aktual tersebut dapat diketahui adanya perbedaan skor penilaian yang dapat membedakan tingkat prioritas dari permasalahan/isu yang ada. Tingkat permasalahan/isu prioritas diambil dari nilai skor USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang paling tinggi berdasarkan skala likert. Dari nilai skor tertinggi dapat ditetapkan/diambil sebagai tema permasalahan/isu utama penyusunan rancangan proyek perubahan, yaitu **Belum Optimal Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**.

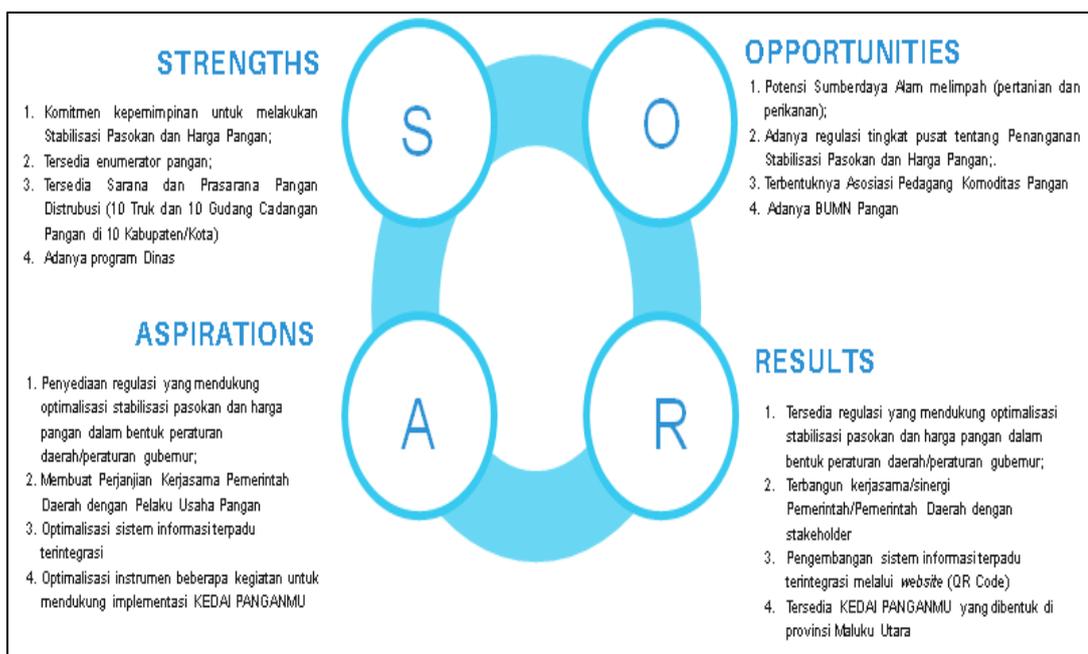
Upaya pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi sehingga mengganggu kelancaran proses distribusi bahan pangan; 2) Panjangnya rantai pasok dan rantai pemasaran; 3) Belum adanya

regulasi berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 4) Belum Adanya Distribusi Center dan wadah penyeimbang seperti Toko Pangan/Kedai Pangan; 5) Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Wilayah Maluku Utara; 6) Belum Optimal Sinergi Kerjasama Antara Daerah, antar Perangkat Daerah terkait/ Instansi terkait, dan dengan pelaku usaha pangan/pemangku kepentingan lainnya; 7) Belum optimal Sistem Informasi Terpadu sebagai “Early Warning System” untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan 8) Belum ada Distributor/Pelaku Usaha Pangan yang memanfaatkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP).

Selanjutnya penyebab masalah prioritas tersebut perlu diuji menggunakan analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Result*). Analisis SOAR merupakan suatu pendekatan untuk melakukan perencanaan strategis yang berfokus pada kekuatan yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya target dan peluang yang dapat dijadikan kekuatan dalam jangka waktu panjang.

Untuk mendapatkan beberapa alternatif solusi penyelesaian masalah yang harus segera diselesaikan terkait upaya peningkatan kinerja, maka berikut analisis SOAR sebagaimana gambar berikut:

Gambar II - 2 Analisis SOAR



III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

3.1. Terobosan Inovatif

Maksud dari penyusunan rancangan proyek perubahan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara (KEDAI PANGANMU) ini adalah adanya terobosan inovasi menyelesaikan masalah/isu.

Dari hasil Analisis SOAR diambil kesimpulan dari beberapa alternatif penyelesaian masalah stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Maluku Utara, yang nantinya dijadikan arah perubahan inovasi yang akan dilakukan melalui implementasi proyek perubahan diantaranya adalah :

- 1) Perlu adanya regulasi di daerah terkait penanganan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- 2) Perlu optimalisasi sinergi membangun kerjasama dalam rangka pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 3) Perlu Optimalisas Sistem Informasi Terpadu KEDAI PANGANMU;
- 4) Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan harga pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi;
- 5) Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang Partisipatif sebagai upaya pengendalian harga pangan secara terpadu dan juga berorientasi mendukung Penurunan Stunting;
- 6) Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan/Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan;
- 7) Penyediaan SuperKedai Pangan yang merupakan wadah atau instrumen dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan juga menyediakan komoditi pangan yang berorientasi pemberdayaan petani/pelaku usaha pangan dan mendukung penurunan stunting.

3.2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan

Tahapan pelaksanaan Proyek Perubahan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara (KEDAI PANGANMU) disusun berdasarkan Milstone Jangka Pendek sebagai berikut :

Tabel III-1 Milstone Jangka Pendek

NO	MILESTONE	KEGIATAN	HASIL	WAKTU
1	2	3	4	5
I	Tersusun rencana kerja dan terbentuknya Tim kerja Internal dan Eksternal	1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk mendapatkan arahan terkait rencana Proyek Perubahan	Dokumentasi	Minggu I Mei 2024
		2. Memimpin rapat pembentukan Tim Internal.	1. Daftar hadir, 2. Dokumentasi	Minggu I Mei 2024
		3. Mendampingi dalam pembentukan Tim Kerja Internal dan Eksternal.	1. Draft SK Tim Kerja Internal 2. Draft SK Tim Kerja Eksternal	Minggu I Mei 2024
		4. Mendampingi Staf dalam menyusun SK TIM Kerja Internal dan Eksternal	1. SK Tim Kerja Internal. 2. SK Tim Kerja Eksternal.	Minggu II Mei 2024
		5. Mendampingi dalam penyusunan Barchard/timeline	Barchard/ Timeline	Minggu II Mei 2024
II	Terlaksananya Dukungan Stakeholder	1. Melakukan koordinasi instansi terkait	Dokumentasi	Minggu I Mei s.d Minggu II Mei 2024
		2. Melakukan Kerjasama Penandatanganan dukungan Stakeholder	1. Testimoni 2. Surat Dukungan	Minggu I Mei s.d II Mei 2024
III	Terlaksananya FGD dan Diseminasi	1. Memimpin pelaksanaan FGD terkait PERGUB tentang Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Daftar Hadir 2. Dokumentasi 3. Notulen, 4. Laporan 5. Spanduk	Minggu II Mei s.d Minggu III Mei 2024
IV	Pelaksanaan Bimtek	1. Memimpin Pelaksanaan Bimtek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Minggu IV Mei 2024

V	Terlaksana Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha	1. Melakukan Sosialisasi Kedai PanganMU di 2 (dua) Kab/Kota	1. Dokumentasi 2. Daftar Hadir 3. Laporan 4. Spanduk	Minggu IV Mei s,d Minggu I Juni 2024
		2. Melakukan/Fasilitasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (antar daerah dan/atau dengan Pelaku Usaha terkait Fasilitasi Distribusi Pangan/Gerakan Pangan Murah di 2 Kab/Kota)	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Minggu IV Mei s,d Minggu I Juni 2024
V	Tersediannya Sistem digitalisasi	1. Melakukan Petemuan dengan Jasa penyedia IT	1. Daftar Hadir 2. Notulen, 3. Laporan	Minggu II Mei s.d Minggu IV Mei 2024, dan Minggu II Juni 2024
		2. Bersama Provider IT Melakukan penyesuaian Desain/Model dan Finalisasi tampilan Interface System	Dokumentasi	Minggu IV Mei dan Minggu II Juni 2024
VI	Pelaksanaan Gerakan KEDAI PANGANMU dan Launching	1. Memimpin Peluncuran Fasilitasi Distribusi Pangan	1. Surat Undangan 2. Daftar Hadir	Minggu IV Mei sd.d Minggu II Juni 2024
		2. Memimpin pemantauan Stok dan Harga Pangan	3. Laporan 4. Spanduk 5. Notulen	Minggu IV Mei s.d s.d Minggu II Juni 2024
		3. Memimpin Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Partisipatif		
		4. Memimpin Pelaksanaan Peresmian Super Kedai PanganMu		Minggu IV Mei s,d Minggu II Juni 2024
		5. Memimpin Pelaksanaan Launching	1. Undangan, 2. Daftar Hadir, 3. Dokumentasi	Minggu IV Mei s.d Minggu II Juni 2024
VIII	Evaluasi dan Pelaporan	1. Bersama Tim Efektif Internal Melakukan Evaluasi Pelaksanaan	1. Daftar Hadir 2. Notulen hasil Evaluasi	Minggu II Juni s,d Minggu III Juni 2024
		2. Menugaskan Tim Efektif Internal Melakukan Penyusunan Laporan Akhir	Laporan	Minggu III s.d Minggu IV Juni 2024

Tabel III-2 Milestone Jangka Menengah

NO	MILESTONE	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Sosialisasi Peraturan Gubernur	Memimpin Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota	1. Dokumentasi 2. Daftar Hadir 3. Notulen dan 4. Laporan	6 Bulan s.d 1 Tahun 2024
2.	Sinergitas Kerjasama dengan Stakeholder	Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan/Gerakan Pangan Murah untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota	1. Dokumentasi 2. Daftar Hadir 3. Notulen 4. Laporan	
3.	Sosialisasi Sistem Informasi Terpadu Kedai PanganMu	Memimpin Sosialisasi Sistem Informasi Terpadu Kedai PanganMu untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota	1. Dokumentasi 2. Layout Sistem Aplikasi KEDAI PANGANMU	
4.	Pelaksanaan Gerakan Penanganan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Maluku Utara	Terlaksananya Gerakan Penanganan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Implementasi Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah Partisipatif, dan Optimalisasi Pemantaun Stok dan Harga Pangan	1. Dokumentasi 2. Laporan	

Tabel III-3 Milestone Jangka Panjang

NO	MILESTONE	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di 10 Kabupaten/ Kota	Mendampingi dalam pelaksanaan penyusunan Ranperda tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Dokumentasi 2. Peraturan Daerah	1 s.d 2 Tahun 2024
2.	Pelaksanaan Festival Pangan Lokal/Pameran Panga Lokal. Terselenggaranya Festival Pangan Lokal sebagai pengganti pangan pokok untuk pemenuhan gizi anak dan remaja dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara.	Memimpin Pelaksanaan Festival Pangan Lokal pengganti pangan pokok untuk pemenuhan gizi anak dan remaja dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara.	1. Daftar Hadir 2. Dokumentasi 3. Spanduk 4. Baliho 5. Umbul-umbul 6. Laporan	

3.3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)

Sumber daya stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek perubahan, adalah sebagai berikut :

3.3.1. Internal

- a. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara berperan selaku mentor yang membina dan mengarahkan reformer selama pelaksanaan proyek perubahan.
- b. Kepala Bidang dilingkup Dinas Pangan selaku koordinator tim internal.
- c. Fungsional Muda Lingkup Dinas Pangan membantu penyiapan administrasi pendukung dan sarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek perubahan.
- d. Seluruh staf Dinas Pangan

3.3.2. Eksternal Pusat

- a. Kepala Badan Pangan Nasional
- b. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- c. Direktur Ketersediaan Pangan
- d. Direktur Stabilisasi Harga

e. Kepala Pusdatin Bapanas

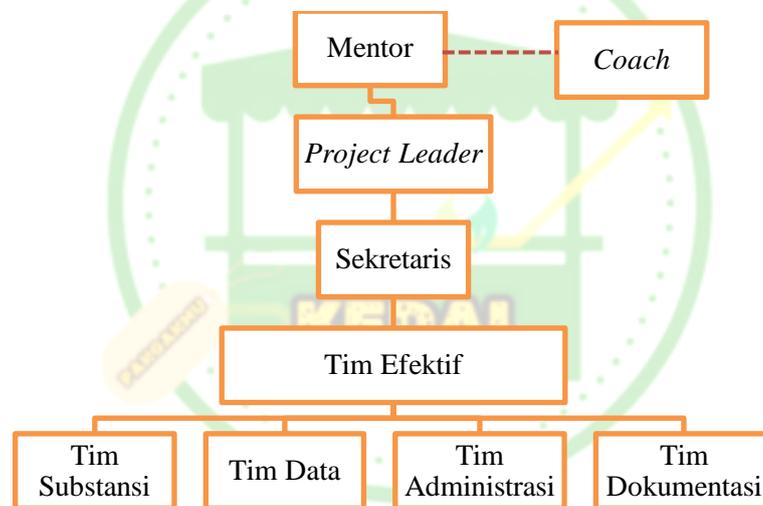
3.3.3. Eksternal Daerah

- Eksternal Instansi Vertikal
 - a. Bank Indonsia Perwakilan Maluku Utara;
 - b. Bulog Ternate
 - c. TNI/Polri
 - d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;
 - e. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Malut;
 - f. Badan Pusat Statistik (BPS);
 - g. Balai Wilayah Sungai;
 - h. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara;
 - i. Balai POM Maluku Utara.
- Eksternal Pemerintah Provinsi
 - a. DPRD Provinsi
 - b. Tim TPID Provinsi
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pertanian
 - e. Dinas Perikanan
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Kominfosan
 - h. Dinas Biro Pemerintahan dan Otda
 - i. Biro Hukum
 - j. Biro Administrasi Pimpinan
 - k. Biro Ekonomi;
- Eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Bagian Ekonomi dan Pembangunan/SDA;
 - g. Asosiasi/Pedagang/Distributor/Pelaku Usaha Pangan
 - h. Petani

3.3.4. Susunan Tim

Untuk melaksanakan Proyek Perubahan ini dibutuhkan tim yang memiliki peran dalam rangka tercapainya tujuan yang akan dicapai. Uraian tim tersebut sebagai berikut:

Gambar III-1 Susunan Tim Tata Kelola Proyek Perubahan



3.3.5. Deskripsi Pembagian Tugas

Mentor :

Membimbing, memfasilitasi dan mendukung Project Leader dalam pelaksanaan Proyek Perubahan.

Coach :

- Melakukan monitoring, intervensi, komunikasi dan mengembangkan instrumen monitoring terhadap progres pelaksanaan e-learning.
- Mengarahkan dan membimbing Project Leader dalam menyelesaikan Proyek Perubahan.
- Melakukan mediasi dan fasilitasi antara Project Leader dengan Mentor bila diperlukan.

Project Leader :

Melaksanakan eksekusi keseluruhan tahap yang telah dirancang, mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, melaporkan proses implementasi kepada Coach, menggerakkan seluruh elemen stakeholder dan mengembangkan sistem melalui monitoring pelaksanaan.

Tim Efektif Internal :

Membantu Project Leader dalam melaksanakan setiap tahapan yang telah direncanakan. Untuk mengoptimalkan fungsi Tim Efektif selanjutnya akan klasifikasikan sesuai klasifikasi tugas masing-masing.

3.3.6. Stakeholder

Stakeholder secara umum dapat diartikan sebagai pihak-pihak terkait (individu, kelompok, organisasi) yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap program/kegiatan dalam rangka pencapaian hasil (output). Dalam konteks merancang proyek perubahan ini yang terlibat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel III-4 Stakeholder Internal

NO	STAKEHOLDER	PERAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara	berperan sebagai mentor yang memberikan arahan dan bimbingan terhadap reformer dalam pelaksanaan proyek perubahan
2	Kepala Bidang Dinas Pangan	membantu project leader dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3	Fungsional Muda dan Staf Lingkup Dinas Pangan	menyiapkan sarana, administrasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan terkait proyek perubahan

Tabel III-5 Stakeholder Eksternal

NO	STAKEHOLDER	PERAN
	Eksternal Instansi Vertikal	
1	Bank Indonesia	Sebagai Penegendali Tim Inflasi
2	BULOG	Penyedia pangan
3	TNI/POLRI	Pengendalian Satgas Pangan
4	Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
5	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Malut	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong Ternate	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
7	Balai Wilayah Sungai	Berpartisipasi dalam pelaksanaan

		implementasi
8	Badan Pusat Statistik (BPS)	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
	Eksternal Instansi Provinsi	
9	DPRD	Menandatangani Komitmen Implementasi
10	TIM TPID	Menandatangani Komitmen Implementasi
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menandatangani Komitmen Implementasi
12	Dinas Pertanian	Membantu menyediakan data produksi
13	Dinas Kominfosan	Membantu penyediaan domain akses
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Membantu menyediakan data produksi
15	Dinas Kesehatan	Membantu menyediakan data stunting
16	Biro Hukum	Membantu menyiapkan Peraturan Gubernur
17	Biro Pemerintahan dan OTDA	Membantu menyediakan naskah perjanjian kerjasama
18	Biro Administrasi dan Pemerintahan	Membantu penyediaan administrasi dan dokumentasi media
19	Biro Ekonomi	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
	Eksternal Kabupaten/Kota	
20	Bupati/Walikota	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
21	Sekda	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
22	Dinas Ketahanan Pangan	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
24	Dinas Pertanian	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
26	Dinas Perhubungan	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
27	Bagian Ekonomi Pembangunan/SDA	Berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi
28	Asosiasi/Pedagang/Distributor	Perjanjian Kerjasama/Penyediaan Komoditi Pangan untuk GPM
29	Petani	Berpartisipasi dalam penyediaan komoditi pangan untuk GPM

3.3.7. Peta Stakeholder

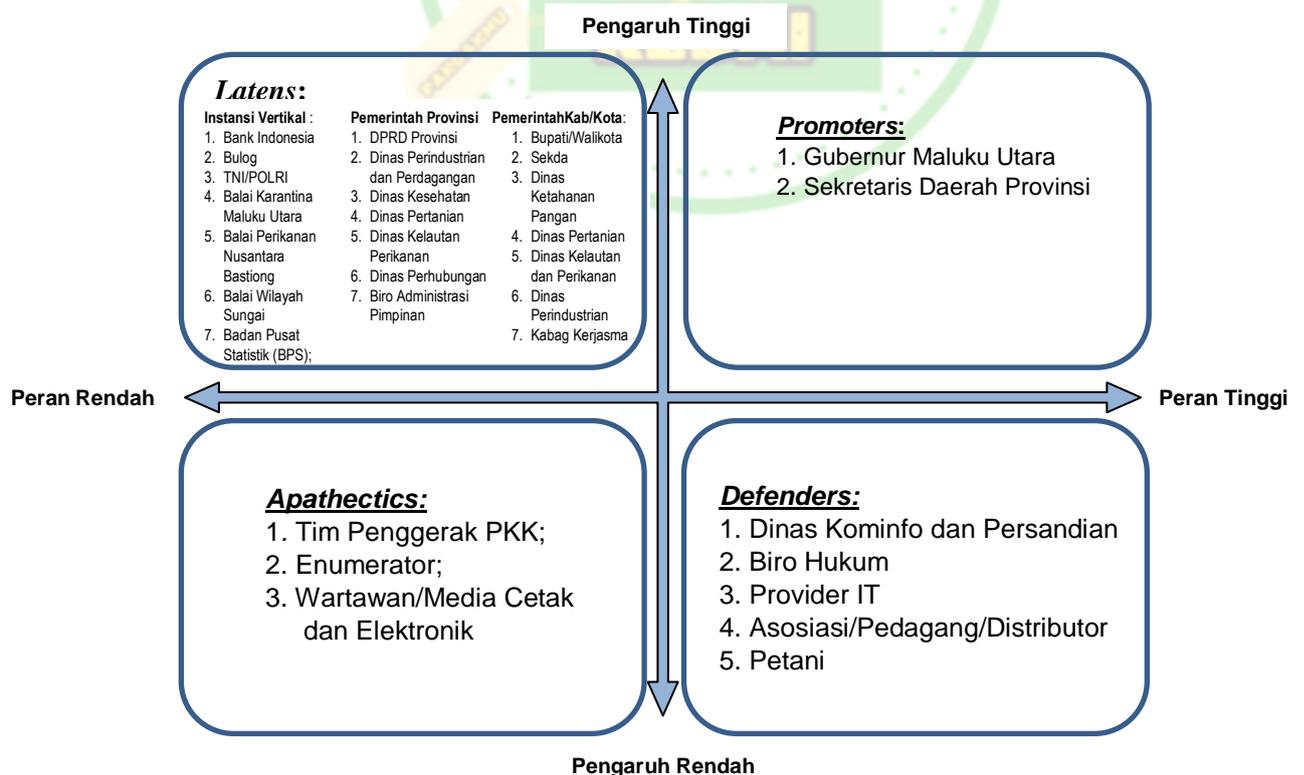
Dalam membangun strategi komunikasi, posisi stakeholder dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan power/pengaruh dan Interest/kepentingan yaitu :

- a. Promotor ; memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkan)

- b. Defenders; memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program kegiatan.
- c. Latents ; Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
- d. Apathetics ; kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

Langkah berikutnya adalah menganalisis stakeholder yang terlibat atau terengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari Proyek Perubahan ini, dan stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Promoter, Latern, Defenders, dan Apathetics. Pengelompokan stakeholder dapat dilihat pada diagram kuadran dibawah ini:

Gambar III-1 Analisa Kuadran Stakeholder



Dari analisa kuadran stakeholder sebagaimana di atas dan dari ke 4 (empat) jenis Stakeholder dapat di jelaskan sebagai mana tabel berikut :

Tabel III-6 Kelompok Promoters

PROMOTERS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya perubahan ini dan juga memiliki kekuatan untuk melaksanakannya	Gubernur Malut Sekretaris Daerah Provinsi	Agar promoters tetap mendukung dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam proper ini upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat melibatkan mereka dalam proyek perubahan ini dan jika terdapat kendala hal yang harus dilakukan adalah segera meyakinkan mereka bahwa mereka tahu sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya.

Tabel III-7 Kelompok Latern

LATERNES	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki pengaruh yang kuat namun belum memiliki cukup ketertarikan untuk terlibat dalam proyek perubahan	<p>Instansi Vertikal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. Bulog 3. TNI/POLRI 4. Pelabuhan Perikanan Nusantara - Ternate; 5. Balai Wilayah Sungai; 6. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Malut 7. Badan Pusat Statistik (BPS); 8. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara; <p>Pemerintah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD 2. Tim TPID 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Kesehatan 8. Biro Pemerintahan dan OTDA 9. Biro Administrasi Pimpinan; 10. Biro Ekonomi; <p>Pemerintah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Walikota 2. Sekda 3. Dinas Ketahanan Pangan; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Kelautan dan Perikanan; 7. Dinas Perhubungan 8. Bagian Ekonomi 9. Pembangunan/SDA 	Upaya yang harus dilakukan untuk menarik kelompok latens ini menjadi kelompok supporter yaitu memberikan informasi dan meyakinkan mereka bahwa proyek perubahan ini memiliki efek positif bagi semua. Sehingga kelompok latent yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, dapat lebih tertarik dan terlibat dalam proyek perubahan ini. Untuk itu, perlu koordinasi secara intensif kepada kelompok ini.

Tabel III-8 Defenders

DEFENDERS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki interest pribadi namun belum cukup mempunyai pengaruh di dalam proyek perubahan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kominfo dan Persandian 2. Biro Hukum 3. Provider IT 4. Asosiasi/IPedagang/Distributor 5. Petani 	Upaya yang dilakukan adalah melibatkan kelompok ini dalam pengambilan keputusan dan sejak dari awal pelaksanaan proyek perubahan. Dengan demikian ketertarikan yang tadinya lemah dapat berubah menjadi kuat sehingga mereka merasa memiliki proyek perubahan ini.

Tabel III-9 Apathetics

APATHETICS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki ketertarikan dan pengaruh yang rendah karena tidak mengetahui bahwa proyek perubahan ini akan berpengaruh ke segala aspek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penggerak PKK 2. Enumerator Kab/Kota 3. Wartawan Media Cetak dan online serta elektronik (RRI) 	Upaya kita yaitu memberikan informasi bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan tahapan untuk optimalisasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara.

3.3.8. Rencana Strategi Marketing

Rencana strategi marketing/strategi pemasaran proyek perubahan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara (KEDAI PANGANMU) adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan mempromosikan pengelolaan Pangan melalui teknologi informasi digitalisasi.

Rencana Strategi Marketing Proyek Perubahan “KEDAI PANGANMU” dilakukan melalui media Sosial dan media Massa secara online dengan tujuan dapat memperkenalkan dan mempromosikan Pengembangan system “KEDAI PANGAN” ke masyarakat atau konsumen yang merupakan sasaran akhir distribusi pangan. Adapun strategi marketing yang digunakan untuk menarik dukungan dari stakeholder dengan menggunakan Pendekatan *product, place, price, promotion* dan *customer* (4P+1C) yaitu :

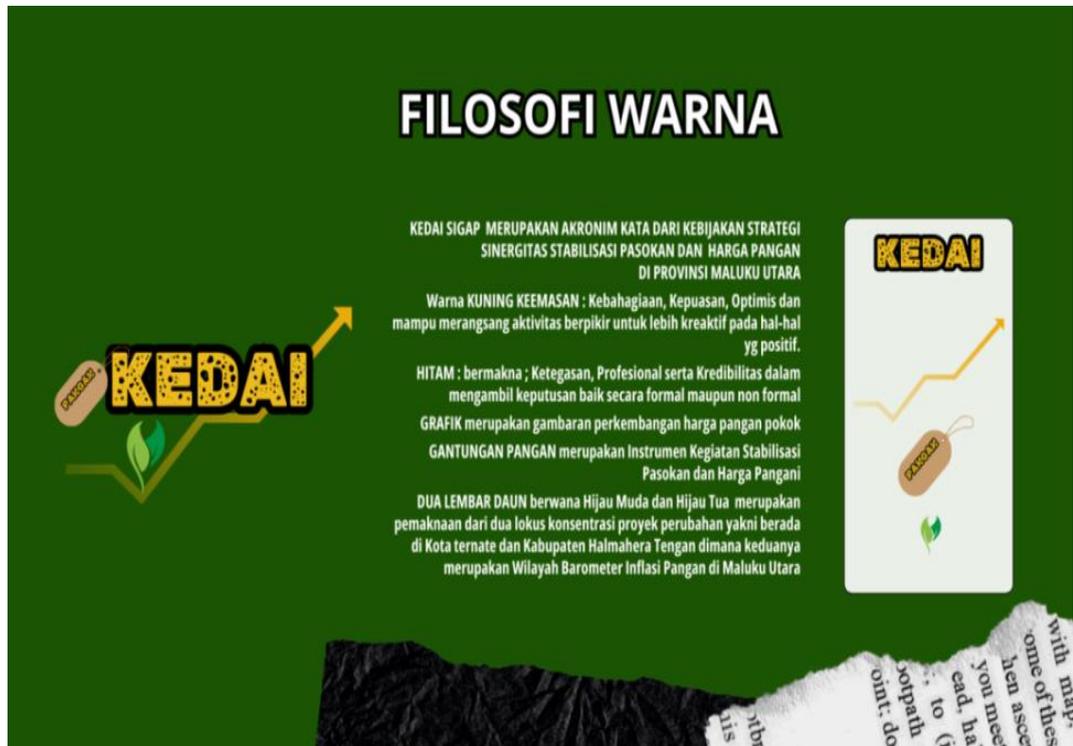
Tabel III-10 Pendekatan Strategi Marketing

Product	Price	Place	Promotion	Customer
1. Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Partisipasi stakeholders dan 2. Sponsorship	Asosiasi Pedagang/Distributor/ Konsumen di 2 (dua) Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate	Media Cetak (Koran lokal), Media Online (WhatsApp, Instagram, Facebook, Tik Tok), RRI dan Poadcast melalui canal Youtube Spanduk, banner dan liftlet	1. Pemda 2. Pelaku Usaha Pangan 3. Masyarakat
2. Perjanjian Kerjasama : dengan Stakeholder/ Pelaku Usaha				
3. Terwujudnya SUPERKEDAI PANGANMU di Provinsi sebagai sentral distribusi				
4. Sistem Aplikasi Terpadu Terintegrasi KEDAI PANGANMU				

GAMBAR III-3 BRANDING KEDAI PANGANMU



GAMBAR III-4 FILOSOFI WARNA



3.4. Manajemen Resiko

Dalam pelaksanaan proyek perubahan “KEDAI PANGANMU” ini tentunya memiliki potensi munculnya kendala dan Resiko, untuk itu perlu dilakukan identifikasi kendala-kendala tersebut agar dapat dilakukan upaya penanganan yang solutif.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, Tim Leader dan Tim Internal harus dapat mengantisipasi dan mengidentifikasi munculnya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas. Setiap kendala telah diberikan solusi penyelesaian, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diatasi dengan solusi-solusi lain yang dapat digunakan termasuk dalam mengatasi kendala-kendala lain yang tidak teridentifikasi pada tahap ini.

Upaya untuk mengatasi kemungkinan kendala-kendala yang terjadi dalam setiap kegiatan pada tahapan proyek perubahan, maka reformer menyusun strategi mengatasi kemungkinan potensi kendala/hambatan yang dihadapi saat

melaksanakan proyek perubahan di lapangan. Adapun manajemen risiko dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

Tabel III-12 Manajemen Resiko

NO	KEGATAN	RESIKO	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Pembentukan Tim Internal	Sikap Pegawai apatis dan belum menerima tugas dan fungsi dalam proyek perubahan	Melakukan pendekatan secara presuasif dan Face to Face dan meyakinkan tugas dan fungsinya dalam proyek perubahan.
2.	Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha	Kesulitan membangun kerjasama dengan pelaku usaha komoditas pangan	Aktif berkoordinasi dengan Stakeholder terkait terutama Asosiasi/Pedagang/distributor secara face to face dan Telephone/Wa
3.	Koordinasi dan penyediaan sistem digitalisasi	Penyedia kurang proaktif dalam menerimasaran dan masukan, lambat dalam pembuatan system	Melakukan Koordinasi intensif dan membangun hubungan yang harmonis
4.	Pelaksanaan GERAKAN KEDAI PANGANMU melalui Implementasi Kegiatan FDP dan GPM Partisipatif	Kurangnya partisipasi stakeholder terkait, minimnya informasi dan sosialisasi kegiatan	Melakukan gerakan Sosialisasi melalui media sosial dan aktif koordinasi intensif dengan stakeholder terkait
5.	FGD Dan Diseminasi	Kurangnya kepedulian dan Pemahaman terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Melakukan Sosialisasi dan Pemahaman terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Berikut dapat dideskripsi tentang faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III-13 Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

NO.	TAHAPAN DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	HASIL	FAKTOR PENENTU
1	Kegiatan koordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait yang terlibat	Terbentuk komitmen bersama	Terbentuknya komitmen dengan pimpinan dan instansi yang terlibat	Dukungan Mentor Dukungan Tim Kerjasama dan hubungan antar personal
2	Pembentukan Tim Efektif	Tersedianya SK Tim	Terbentuknya Tim Efektif	Dukungan Mentor Dukungan Tim Kerjasama dan hubungan antar personal
3	Dukungan Stakeolder Terkait	Testimoni dan Pernyataan dukungan dan	Tersediannya Dok. Testimoni dan Surat Pernyataan Dukungan	Dukungan Mentor Dukungan Stakeolder Kerjasama dan hubungan antar personal
4.	Penyusunan Regulasi	Tersedia SK.Gubernur	SK.Gubernur	Ketersediaan sumberdaya Kompetensi tim pengumpul data Kerjasama yang baik
5.	Pembuatan Sistem	Interface	Tersedianya	Dukungan Provider IT

	informasi terpadu	Aplikasi	Sistem Aplikasi	
6.	FGD dan Diseminasi	Terlaksananya FGD dan Diseminasi	Dokumentasi Daftar Hadir Laporan	Dukungan Mentor Dukungan Tim Kerjasama stakeolder dan hubungan antar personal
7.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengukuhan	Laporan Layout Sistem Aplikasi	Dukungan Mentor Dukungan Tim Kerjasama stakeolder dan hubungan antar personal
5	Pelaksanaan Strategi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	FDP,GPM, Toko/ Kedai Pangan, Pemantauan Stok dan Harga Pangan	Dokumentasi Undangan Daftar Hadir Spanduk Laporan	Dukungan Pemerintah Kec/Desa/Kelurahan, Dukungan Masyarakat

3.5. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dalam proses pelaksanaan proyek perubahan adalah salah satu perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.

Strategi komunikasi erat hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi (masalah) yang harus diperhitungkan, kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai.

3.5.1. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi dalam Proyek Perubahan

Strategi komunikasi pada proyek perubahan ini perlu disusun secara sistematis, sebagai upaya merubah pengetahuan, sikap dan tingkah laku Masyarakat atau sasaran. Menurut Arifin (1994), agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikasi perlu menentukan langkah-langkah strategi komunikasi.

3.5.2. Mengenal Masyarakat/Khalayak

Untuk mencapai hasil yang positif dalam proses komunikasi, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metode dan media. Untuk mempersamakan kepentingan tersebut maka komunikator harus mengerti dan memahami pola pikir (*frame of reference*) dan pengalaman lapangan (*field of experience*) khalayak secara tepat dan seksama. Hal pertama yang harus dimengerti dari Masyarakat/khalayak

adalah kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak seperti: 1) Pengetahuan Masyarakat/khalayak mengenai pokok permasalahan, 2) Pengetahuan khalayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan, dan 3) Pengetahuan Masyarakat/khalayak terutama perbendaharaan kata yang digunakan. Kedua, pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma dalam kelompok itu berbeda, ketiga situasi kelompok di mana itu berada.

3.5.3. Menentukan Tujuan

Tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang akan digunakan. Adapun beberapa tujuan komunikasi yang baik antara lain yaitu: Memberikan informasi merupakan interproyek komunikasi. Masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang telah diperlukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut yang merupakan bagian dari keadaan percaya dan rasa aman.

Menolong orang lain, memberikan nasehat kepada orang lain dalam mencapai tujuan. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, karena semakin tinggi kedudukan atau status seseorang maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknis sehingga dalam penyelesaian masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan. Mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan.

3.5.4. Menyusun Pesan

Model pilihan strategi melihat bagaimana komunikator memilih diantara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan model desain pesan memberikan perhatiannya pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk mencapai tujuan. Proses tersebut kemudian menjadi langkah untuk menentukan strategi komunikasi dengan cara menyusun pesan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan yaitu:

- a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran.
- b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran , sehingga sama-sama dapat dimengerti.
- c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.

- d. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh suatu kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana sasaran pada saat digerakkan untuk memberi jawaban yang dikehendaki.



IV. RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN Mendukung PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara (KEDAI PANGANMU) memiliki kaitan dengan mata pelatihan kompetensi pilihan yaitu Manajemen Pemerintahan, Diagnosa Organisasi, Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Risiko Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

4.1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan adalah gabungan dua suku kata, yaitu manajemen dan pemerintahan. Sondang P Siagian mendefinisikan Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan pada aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Manajemen pemerintahan, juga dikenal sebagai manajemen administrasi publik, merujuk pada praktik dan proses yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan program-program publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Manajemen pemerintahan dimulai dari proses tahapan: 1) perencanaan pemerintahan yang memiliki tujuan dan prioritas kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan; 2) pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, yaitu perencanaan yang telah disusun dan diharmonisasi, kegiatan berikutnya lembag/organisasi pemerintahan sebagai unsur penyelenggara Negara melaksanakan tugas sesuai dengan unit kerja yang dibentuk berdasarkan pendekatan urusan pemerintahan baik di pusat dan daerah; 3) penggunaan sumber-sumber pemerintahan; 4) kontrol Pemerintahan, yaitu kontrol dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP.

Terdapat 5 (lima) kecenderungan ketika berbicara tentang Manajemen Pemerintahan yaitu ; 1). Dilihat dari peranan Pemerintah; 2) dilihat dari Misi dan Visi; 3) dilihat dari fungsi-fungsi manajemen; 4) dilihat dari fungsi organisasi; dan 5) dilihat dari kepemimpinannya.

Menurut Ryaas Rasid dalam Ndraha (2005:58), menjelaskan bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

Manajemen dalam organisasi pemerintahan, dapat diuraikan pada 2 (dua) hal, yakni : 1) Kelembagaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yaitu kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan 2) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Manajemen Pemerintahan Era Revolusi 4.0, terdapat empat kompetensi sebagaimana dinyatakan Sharon dan Ken Key, (dalam Endang M.Kendana, Modul Manajemen Pemerintahan), yaitu berfikir kritis, (*critical thinking*), komunikatif (*communication*), kolaboratif (*collaboration*), dan berfikir kreatif dan inovatif (*creative and inovatif*). Juga diidentifikasi 10 ketrampilan yang diperlukan pada tahun 2020, yaitu pemecahan masalah yang kompleks, berfikir kritis, kreatif, manajemen SDM, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, orientasi layanan, negosiasi, dan fleksibilitas berfikir.

Beradaptasi dengan era governance 4.0 atau digital governance yang mencakup pada 5 (lima) kemampuan, yaitu : merujuk pada tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, talent management, capacity building, pembelajaran berbasis teknologi serta Co-working space. Selain itu, penciptaan birokrasi dinamis berbasis teknologi menurut Prasojo (2020), memiliki setidaknya enam indikator, yaitu Kapabilitas/keahlian, Budaya (tidak korup), Kebijakan (adaptif dan terintegrasi antar unit), Organisasi Kinerja, Multistakeholder Partnership (*collaborative*) dan joint and Integrated Budgetary System.

Manajemen pemerintahan yang baik memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah, memastikan layanan publik yang berkualitas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini melibatkan praktik dan prinsip yang berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

Manajemen pemerintahan dalam penyusunan proyek perubahan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi inisiatif perubahan yang dilakukan oleh sektor pemerintahan. Ini melibatkan sejumlah tahapan dan praktik manajemen yang penting untuk memastikan keberhasilan proyek perubahan tersebut. Manajemen pemerintahan yang efektif dalam penyusunan proyek perubahan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Proses ini juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dengan mata pelatihan “Manajemen Pemerintahan”, penyusunan proyek perubahan ini juga melalui kompetensi komunikatif, kolaboratif, berfikir kreatif dan inovatif, juga pembelajaran berbasis teknologi, dan ketrampilan lainnya.

4.2. Diagnosa Organisasi

Pemimpin organisasi publik perlu terus melakukan perubahan dalam rangka memastikan efektivitas organisasinya agar pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya dan bahkan dapat terus ditingkatkan. Untuk melakukan perubahan inilah dibutuhkan kemampuan mendiagnosa organisasi, menentukan masalah yang tepat untuk dipecahkan dalam rangka memastikan efektivitas organisasi. Kemampuan ini adalah kemampuan mendasar bagi seorang pemimpin organisasi untuk memastikan bentuk perubahan/intervensi yang tepat bagi organisasinya. Kemampuan diagnosa ini juga adalah tentang bagaimana seorang pemimpin memiliki kesadaran untuk selalu peka dan peduli terhadap efektivitas organisasi/unit kerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam lingkungan yang selalu berubah.

Konsep/modul diagnosa organisasi merupakan salah satu mata pelatihan pilihan yang penting bagi kami untuk menjadi dasar dalam menentukan ketepatan rencana aksi perubahan. Konsep diagnosa organisasi dalam penyusunan proyek perubahan ini adalah proses analisis lingkungan eksternal organisasi, proses diagnosa komponen internal organisasi, dan tahapan diagnosa organisasi.

Dengan diagnosa organisasi kami sebagai Kepala Dinas akan dapat menemukan isu strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal organisasi dan mendiagnosa komponen internal organisasi guna

merumuskan gagasan proyek perubahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

4.3. Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serahaterima hasil pekerjaan.

Dari definisi tersebut, dapat digambarkan tahapan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kebijakan pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan-kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/jasa;
- b) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Transparan, Terbuka, dan Kompetitif;
- c) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Serta Transaksi Elektronik;
- f) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan Standar Nasional Indonesia (SN);
- g) Memberikan Kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
- h) Mendorong Pelaksanaan Penelitian dan Industri Kreatif;
- i) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dalam melaksanakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bila anggarannya bersumber dari APBN atau APBD termasuk sebagian atau seluruhnya, maka semua pengadaannya harus patuh dan mengacu pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus sesuai dengan prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan etika.

4.4. Risiko Pengadaan Barang dan Jasa

Definisi risiko menurut ISO 31000-2018, yaitu akibat/dampak yang muncul dari adanya suatu ketidakpastian (dapat bersifat positif ataupun negatif) dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau dampak tersebut merupakan penyimpangan dari tujuan yang diharapkan.

Penanganan risiko, diantaranya : 1) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (prevention/abate); 2) menurunkan dampak terjadinya risiko (mitigate); 3) mengalihkan risiko (share); 4) menerima risiko (accept/retain).

Konsep risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Risiko Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Risiko Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bisa saja terjadi. Contoh bila hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa tidak sesuai/selaras dengan kebutuhan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, maka dapat dilakukan penanganan risikonya berupa mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, berupa perumusan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh SDM yang berkompeten.

2. Risiko Pemilihan Penyedia Barang/jasa Pemerintah

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah juga ada risikonya. Contoh, bila hasil rewiu Pokja ULP tidak disetujui oleh PPK Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, maka dapat dilakukan penanganan risikonya dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, berupa : dokumen persiapan pengadaan disusun secara matang.

3. Risiko Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga berisiko misalnya adanya kekeliruan dalam konsep kontrak. Bila bahasa kontrak menimbulkan multitafsir, dapat dilakukan penanganan risikonya dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, berupa penyusunan rancangan kontrak didampingi oleh tim ahli kontrak.

4. Risiko Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan juga berkaitan dengan swakelola, terutama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Karena itu contoh, apabila RAB pengadaan barang jasa secara swakelola tidak

akurat, dapat dilakukan penanganan risikonya dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, berupa Penyusunan RAB pengadaan barang/jasa secara swakelola, SDM Dinas Pangan perlu didampingi oleh tenaga ahli.



V. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa organisasi mampu menghadapi perubahan dengan sukses. Proyek perubahan dapat berupa implementasi teknologi baru, restrukturisasi organisasi, perubahan budaya perusahaan, atau inisiatif lainnya yang dapat mempengaruhi cara kerja dan budaya organisasi. Identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proyek perubahan. Ini dapat mencakup kepemimpinan, keterampilan teknis, manajemen perubahan, dan kemampuan interpersonal.

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan perubahan dengan efektif. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk berhasil menghadapi perubahan dan bersaing di lingkungan yang terus berubah. Berikut adalah langkah-langkah dalam merancang rencana strategi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan:

5.1. Kepemimpinan Strategis

Fokus pada pengembangan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola perubahan. Ini termasuk pelatihan untuk pemimpin yang akan memimpin proyek perubahan dan pengembangan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan visi perubahan, memotivasi tim, dan mengatasi hambatan.

Peranan kepemimpinan dalam Pemerintah Daerah memainkan peran kunci dalam merumuskan visi dan misi pemerintah daerah. Kepemimpinan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta merencanakan arah pengembangan untuk kemajuan organisasi. Pemimpin daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting terkait dengan kebijakan, program, dan anggaran. Pemimpin yang baik dapat mengarahkan sumber daya dan upaya dengan bijak, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin yang mengembangkan model kepemimpinan ketauladanan adalah pemimpin yang menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh dan panutan

bagi para anggota tim atau organisasi mereka. Model kepemimpinan ketauladanan, juga dikenal sebagai "leadership by example" atau "leading by example", adalah salah satu pendekatan kepemimpinan yang paling efektif. Dalam model ini, seorang pemimpin menunjukkan perilaku, nilai, dan standar yang diinginkan kepada anggota timnya dengan menjadi contoh yang positif.

Dalam mengembangkan model kepemimpinan ketauladanan, pemimpin ini membantu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa termotivasi dan terinspirasi untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Mereka juga membantu membangun budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai positif dan etika yang kuat. Kesimpulannya, pemimpin ketauladanan bukan hanya memerintah, tetapi mereka memandu dengan mengambil tindakan nyata dan memberikan contoh yang positif bagi orang lain. Untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan pimpinan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat, di samping lebih mengutamakan pembelajaran mandiri.

Kepemimpinan pemerintah daerah berperan dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan wilayah mereka. Mereka harus merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

5.2. Kompetensi dan Pengembangan SDM

Kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah dua aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia di berbagai organisasi. Keduanya berperan dalam meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan.

Ini mencakup berbagai aspek, pertama pengetahuan yaitu pemahaman tentang konsep, teori, dan informasi yang relevan untuk pekerjaan atau tugas tertentu. Kemudian ketrampilan yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi praktis. Ini mencakup keterampilan teknis, analitis, komunikasi, kepemimpinan, dan lainnya. Kemudian sikap (attitude) sikap positif dan mentalitas yang mendukung produktivitas dan kerja sama. Ini termasuk etika kerja, motivasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya perilaku yaitu cara individu berinterproyek dengan orang lain di tempat kerja. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim,

mengelola konflik, dan lainnya. Manajemen kompetensi melibatkan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Ini termasuk proses perekrutan dan seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan.

Pengembangan SDM adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang siap menghadapi perubahan, tugas baru, dan tantangan yang muncul. Ini juga merupakan alat penting untuk memotivasi karyawan, meningkatkan retensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menyusun rencana pemberdayaan SDM yang terukur dan berkelanjutan dimulai dari identifikasi kebutuhan diklat untuk setiap jenjang jabatan, disusun Training Need Analysis (TNA) untuk mengetahui gap pada masing-masing jabatan dan menjamin kesetaraan dan keadilan (SARA, Kesetaraan Gender, Disabilitas) dalam program pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM. Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM tidak mempertimbangkan SARA dan lebih menggunakan dasar kebutuhan diklat pada masing-masing jenjang jabatan.

Dalam memantau dan mengevaluasi keberhasilan program pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM yang telah dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu pelaporan hasil pasca diklat dan wajib transfer kompetensi kepada rekan kerja lainnya pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

5.3. Kepemimpinan Digital

Pemanfaatan teknologi yang efektif adalah kunci untuk mengoptimalkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan banyak lagi. Teknologi modern telah membuka peluang baru dan mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan organisasi atau individu, serta kemampuan untuk memilih, menerapkan, dan mengelola teknologi dengan bijak. Sementara teknologi dapat memberikan

banyak manfaat, penggunaannya juga perlu diimbangi dengan pertimbangan etika, privasi, dan keamanan yang tepat.

Kepemimpinan digital yang memanfaatkan teknologi yang efektif adalah kunci untuk mengoptimalkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan banyak lagi. Teknologi modern telah membuka peluang baru dan mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan organisasi atau individu, serta kemampuan untuk memilih, menerapkan, dan mengelola teknologi dengan bijak. Sementara teknologi dapat memberikan banyak manfaat, penggunaannya juga perlu diimbangi dengan pertimbangan etika, privasi, dan keamanan yang tepat.

Pengembangan inovasi yang dilakukan tidak terlepas dari pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini. Dukungan teknologi yang ada saat ini dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dengan tujuan optimalisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui integrasi sistem informasi. Sehingga pelimpahan tugas oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan memanfaatkan teknologi, kita akan dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang dalam organisasi. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya, serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Pemanfaatan teknologi yang efektif memerlukan investasi dalam sumber daya manusia yang terampil, serta perencanaan yang matang untuk memastikan teknologi digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Teknologi adalah alat yang sangat kuat untuk memajukan organisasi, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan khusus dari masing-masing organisasi.

VI. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Sikap perilaku menunjukkan keperibadian seseorang, pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel rekapan nilai akhir perilaku peserta dibawa ini :

Tabel VI-1 Rekap Nilai akhir Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Dheni Tjan, SH, M.Si	Nama Mentor	: DRS. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.Si		
NIP	: 197507302001121001	NIP:	: 197010121991011003		
Jabatan	: Kepala Dinas	Jabatan	: Sekretaris Daerah		
Instansi	: Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	Instansi	: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara		
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	9,14	8,62	8,83	8,86	Baik
Mentor	9,19	8,69	9,12	9,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,17	8,67	9,04	8,96	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Istimewa	Baik	
Keterangan Kualifikasi					
9.99-10	Istimewa		Akhir Sikap Perilaku		
7-8.99	Baik		8,96		
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi				
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan adminisrator				
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan administrator				
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan administrator				
Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan administrator				

Pengembangan potensi diri yaitu suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah personal mastery, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Nilai Akhir Perilaku Peserta di atas dengan nilai rata-rata 8 (delapan) kualifikasi baik.

Pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi sikap serta perilaku seorang pemimpin dalam berbagai situasi. Ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seorang pemimpin, serta untuk merancang rencana pengembangan kepemimpinan yang lebih efektif.

6.1. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Rencana pengembangan potensi diri sebagai hasil dari Pelatihan Kepemimpinan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

6.2.1 Komponen Integritas:

Memperhatikan arahan pimpinan dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dengan cara memberikan laporan Rencana Proyek Perubahan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan terkait hasil pekerjaan, sehingga perlu dilakukan mentoring; Memacu diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menjadi lebih baik lagi dengan membiasakan diri (habitiasi) dalam menjaga perilaku sehingga lebih disiplin dalam mentaati segala peraturan yang berlaku sehingga lebih profesional untuk mencapai tujuan organisasi

Perlu pengembangan diri untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk kegiatan yang lebih terukur dengan akuntabilitas yang lebih baik. serta yang lebih mudah dan terukur.

6.2.2 Komponen Kerjasama:

Membentuk koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim, termasuk tim dari eksternal/Instansi terkait/Pelaku Usaha Pangan selain Dinas Pangan

Provinsi Maluku Utara karena proyek perubahan yang sedang dilaksanakan menjadi kebutuhan bersama dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Kerjasama yang baik antar OPD diperlukan agar tujuan dapat dicapai dengan baik.

Meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi serta berinterproyek dengan baik, baik internal maupun eksternal Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara melalui kegiatan proyek perubahan/inovasi.

Kemampuan dalam hal menyampaikan, menggali, menerima serta mendistribusikan informasi dengan cara menjadi narasumber dalam setiap rapat koordinasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

6.2.3 Komponen Mengelola Perubahan:

Perlu lebih adaptif dalam mengelola perubahan yang diinginkan. Perkembangan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan, tidak multitafsir, dan menciptakan perubahan lebih baik dan berdaya saing.

Berupaya meningkatkan kemampuan untuk yang berorientasi pada pelayanan yang baik dalam memberikan informasi dan data dengan cara selalu mengevaluasi output dan outcome terkait semua kegiatan terutama terkait tugas pokok dan fungsi agar memberikan manfaat terhadap pimpinan, perangkat daerah dan masyarakat serta mudah di akses oleh pimpinan, perangkat daerah dan masyarakat.

Berupaya untuk mengembangkan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan untuk pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun staf dengan cara membentuk tim dalam pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi agar tujuan organisasi tercapai dengan baik dan tepat waktu.

Pengembangan potensi diri yaitu suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah *personal mastery*, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Berdasarkan hasil self assessmant tersebut, dengan memperhatikan nilai pada sub komponen formulir peserta atau mentor dan rekapan nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melakukan proyek perubahan dengan bimbingan dan pendampingan terjadwal sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku dalam jabatan pimpinan administrator. Selanjutnya dapat dilihat pengembangan Potensi Diri dalam Bentuk Kegiatan sebagai berikut:

Tabel VI-4 Pengembangan Potensi Diri Dalam Bentuk Kegiatan-Kegiatan

No	Komponen / Sub Komponen	Panduan Intervensi	Kegiatan Pengembangan Diri Untuk Mendukung Proyek Perubahan	Kegiatan / Tahapan Proyek Perubahan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri		
					Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kerjasama/Membangun Kerjasama dengan Tim						
	Mengurai informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah dilingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya	Kemampuan Dalam Memberikan Informasi proyek perubahan dengan baik	Kegiatan yang dilaksanakan : persiapan Penyusunan draf RPP dan Pembentukan Tim Efektif Internal	Terbentuknya Tim Efektif Internal	Minggu I Mei 2024		
2	Kerjasama/Membangun Kerjasama dengan Pihak Internal						
	Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi.	Membangun kerjasama dalam membentuk kerangka berpikir proyek perubahan	Kegiatan yang dilakukan adalah Penyampaian RPP dalam Persiapan penyusunan Draf RPP dan pembentukan Tim Efektif Internal	Terbentuknya Tim Efektif Internal	Minggu I Mei 2024		
3	Kerjasama/Membangun Kerjasama dengan Pihak Eksternal						
	Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerjasama yang sifatnya berkelanjutan	Membangun Sinergitas Kerjasama dengan Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan	Kegiatan yang dilaksanakan adalah Melakukan Kerjasama Penandatanganan dukungan Stakeholder	Pertemuan Penandatanganan Kerjasama dengan Pelaku Usaha	Minggu II Mei 2024		

4	Mengelola Perubahan / Orientasi Pada Hasil					
	Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan.	Melaksanakan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Strategi kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan FGD, Peraturan Gubernur dan Diseminasi 2. Pelaksanaan Penadatangan Kerjasama dengan Pelaku Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur 2. Perjanjian Kerjasama (PKS) 	Minggu III dan Minggu IV Mei 2024	



DAFTAR PUSTAKA

- Alderfer Clayton P., *The Practice of Organization Diagnosis : Theoty and Methode*, Oxford University Press, 2011
- Anderson Donald L., *Organization Development : The Process of Leading Organization Change*, Sage, 2017
- , Bahan Tayang, Pengadaan Barang dan Jasa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Barang dan Jasa, 2022
- Budiman Sakti, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi, Pareto : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019.
- Burke., W, W., and Litwin, G, H, *A causal model of organizational performance and change. Journal of Management*, 18, 23-545., 1992;
- Catur Sumar Sri Susatyo dan Makhдум Priyatno, Energi Kepemimpinan (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Admnistrasi Negera, 2021;
- Chandra Wijaya, Muhammad Rifai, Dasar Dasar Manajemen, Perdana Publishing, 201
- Dalam Satyawan Salam, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, Penerbit Djambatan, 2002
- Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Daerah Pemerintah*, Fakultas ukum Universitas Singaparbangsa Karawang.
- Endang M. Kendana, Modul Manajemen Pemerintahan;
- Erna Irawati, Isu Strategi, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;
- Erna Irawati Syifaurohmah, Policy Brief, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2023;
- Ferguson, (2009), *Leadership Skills, Third Edition*, Infobase Publishing, New York.
- Gatot Widayanto, Kepemimpinan Kewirausahaan (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;
- Hari Supriyadi, Marketing Sektor Publik, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;
- Organisasi Pembelajar, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;
- Harry Sri Kahartan, dan Satriyo Wibowo, Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul), LKPP, 2022;
- Imam Ropii, Pola ubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Konsepsi dan Dinamikanya)
- Inu Kencana Syafie., Syafie Inu, *Ilmu Pemerintah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2013
- Komang Jaka Ferdinan I Dodi Faedlulloh2, dam Ibrahim 3: *Birokrasi, Disrupsi dan Anak Muda Mendorong Birokrat Muda Menciptakan Dynamic Governance* 1&3 Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitungl 2 Jurusan Adminisrasi Negara, Universitas Lampung.
- Mochamad Fatwadi, Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;
- Modul Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerinyah, LKPP, 2022

Plattner, H., Meinel., C., Leifer, L : *Design Thinking Research: studying co-creation in practice.*

Reghi Perdana, Kemitraan Swasta dan Pemerintah, (*Public Private Partnership*), Modul PKN Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, 2021;

Rumah Handoko, Integritas Kepemimpinan, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;

Setia Budi, Erna Irawati, dan Tim P3K Bangkom ASN LAN RI, Proyek Perubahan, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2023;

Setia Budi dan Mochamad Fatwadi, Diagnosa Organisasi (Modul Kepemimpinan Pengawas), Lembaga Administrasi Negara, 2021;

Tatang Muttaqin, Manajemen Strategis Sektor Publik, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2021;

Tim P3K Bangkom ASN LAN, Erna Irawati, Elly Fariani, Visitasi Kepemimpinan Nasional, (Modul PKN Tingkat II), Lembaga Administrasi Negara, 2023;

Thoimas, G., Cummings Christopher G, Worley., Organization Development & Change, Cengage Learning, 2015.

Wiryanta Muljono, Kepemimpinan Digital (Modul PKN Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, 2021;

REFERENSI KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan tahun 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen;

Surata Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi, 2022;

Rencana Pembangunan Jangka Pangang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Bappenas, 2024;

Rancangan Teknokrtaik RPJMN 2025-2029, Bappenas, 2024;

Rancangan RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045, Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2024;

Rancangan Teknokrtaik RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2024;

Rensrta Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;

Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2024, BPS Provinsi Maluku Utara, 2024.